

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan. RENJA Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 ini merupakan Dokumen Rencana Pembangunan satu tahun yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yang disusun secara sinergis dan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran/indikator hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Dokumen RENJA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2025 disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah.

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dapat menjadi acuan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2025.

Larantuka, Juli 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN FLORES TIMUR,

SIPRIANUS SINARITAN, S. SOS. M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197001231 199903 1 056

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Peraturan Bupati Flores Timur	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja perangkat Daerah	32
3.3 Program dan Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	37
BAB V PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	24
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 ..	31
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025	33
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	35
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah..... 1

BAB I
PENDAHULUAN

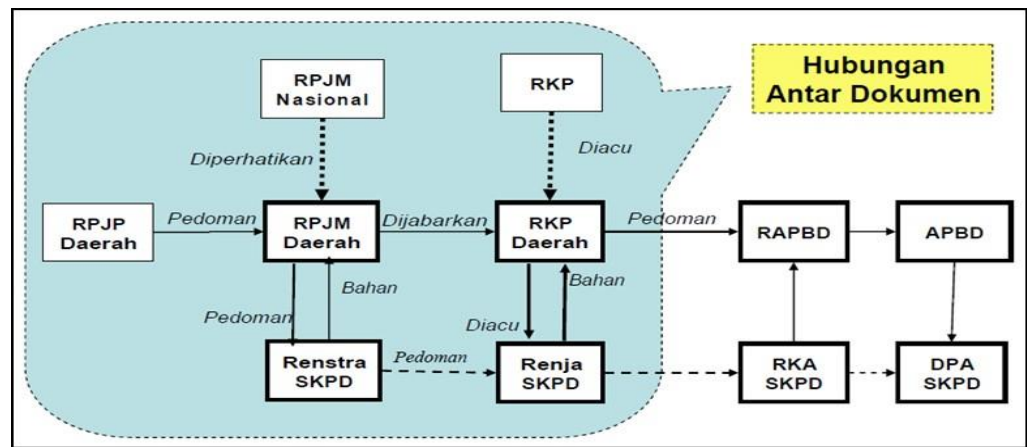
1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2025, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 tahun 2024.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Perdagangandan Perindustrian Kabupatrn Flores Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran Tahun Ketiga Renstra PD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Renja PD Tahun 2025 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Gambar. 1 Proses penyusunan Renja dan hubungan dengan dokumen lainnya.



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun, 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.;
25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

26. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.
27. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah tersedianya Dokumen Rencana Kerja tahun 2025 yang merupakan penjabaran RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu baik antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur maupun antar wilayah;
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025
4. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu baik antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur maupun antar wilayah;
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen RENJA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENJA.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V . PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja tahun 2025 merupakan tahun ketiga Renstra 2023-2026 untuk Program Penunjang Urusan Kabupaten masih dengan indikator yang sama sedangkan pada Program Urusan Perdagangan dan Perindustrian tahun 2023 93,51% dan untuk tahun 2023-2026 dengan target indikator 100% dan target Program, sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 2023
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN FLORES TIMUR

Kode					URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA 2023-2026)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL, PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d TAHUN 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					TARGET RENJA	REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	K		K	Rp	K	K	K
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN														
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100	100	100	100%			
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100	100	100	100%			
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	100	100	100	100%			
						Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100	100	100	100	100%			
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100		100					
3	30	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat dareah(dok)	8	0	2	2	100%			
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	5		2	2	100%			

3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	24	8	6	6	100%			
3	30	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah(laporan)	16		4	4	100%			
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan (%)	100		100					
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ()	23/14		23/14	23/14	100%			
3	30	01	2.02	03	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36		-	-	-			
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD (dok)	12	12	12	12	100%			
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD(laporan)	8		2	2	100%			
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi dan Pelaporan BMD (%)	100		100					
3	30	01	2.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencanaa kebutuhan barang milik daerah SKPD (dok)	3		-	-	-			
3	30	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD(laporan)	20		2	2	100%			
3	30	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	18		-	-	-			
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12		4					
3	30	01	2.05	03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendatan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	36		-	-	-			
3	30	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai(dokumen)	4		1	1	100%			

3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)	8		3	1	33%			
3	30	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang - undangan(orang)	1		-	-	-			
3	30	01	2.06		Administrasi Umum perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100		100					
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi /Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan()	12	10	3	3	100%			
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan ()	8		2	2	100%			
3	30	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan()	4		1	1	100%			
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan()	4	1	1	1	100%			
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan()	4		1	1	100%			
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan (dokumen)	4	2	1	1	100%			
3	30	01	2.06	08	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu(laporan)	48	12	12	12	100%			
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD(laporan)	48	12	12	12	100%			
3	30	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis pada SKPD	2		-	-	-			
3	30	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3		-	-	-			
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ()	84		56					
3	30	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan()	1		-	-	-			
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan ()	19		-	-	-			

3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ()	9		-	-	-			
3	30	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Disediakan ()	23		2	2	100%			
3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan()	50		54	49	91%			
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100		100					
3	30	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat - menyurat(laporan)	48	12	12	12	100%			
3	30	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	48	12	12	12	100%			
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan(laporan)	48	12	12	12	100%			
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100		100					
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara yang dibayar pajak dan perizinannya()	7	7	7	7	100%			
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3		-	-	-			
3	30	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara ()	1		-	-	-			
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangun lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi ()	1	1	1	1	100%			
3	30	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ()	34	12	28	28	100%			
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	03			Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Cakupan sarana distribusi perdagangan	36,11							

3	30	03	2.01		Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah penglolaan sarana distribusi perdagangan()	4							
3	30	03	2.01	01	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan ()	4	1	-	-	-			
3	30	03	2.02		Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Terbinanya pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)	4		5					
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan(Dokumen)	4	1	1	1	100%			
3	30	04			Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan harga barang penting	Terkendalnya harga barang (laporan)	19		19					
3	30	04	2.02		Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota	Terkendaliannya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota(laporan)	12		3					
3	30	04	2.02	01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota(laporan)	4	1	1	1	100%			
3	30	04	2.02	02	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan(laporan)	4	1	1	1	100%			
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Jumlah laporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota(Laporan)	4	1	1	1	100%			
3	30	06			Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentasi perlindungan dan pengamanan konsumen(%)	38,67		16,37					
3	30	06	2.01		Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang dan pengawasan	Jumlah peralatan UTTP dan Pelaku usaha yang diawasi()	945		400					
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang	jumlah Alat Ukur, Alat Takar , Alat Timbang, dn Alat perlengkapan Ditera ulang()	415	95	300	301	100%			
3	30	06	2.02	02	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina(orang)	530		100	90	90%			

3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Hasil Penyidikan Metrologi Legal()	200		-	-	-			
3	30	07			Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Cakupan UMKM yang difasilitasi (%)	13,64		18,18					
3	30	07	2.01		Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri	32		3					
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten / Kota(UMKM)	12	12	-	-	-			
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan Retail, Marketplace, perhotelan dan Jasa Akomodasi(UMKM)	20	12	-	-	-			
3	30	07	2.01	03	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan (Dokumen)	4	1	1	1	100%			
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	02			Program Perencanaan dan pembangunan industri	Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian(%)	60,61		15,15					
3	31	02	2.01		Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota(Dokumen)	12		1					
3	31	02	2.01	01	Penyusunan rencana pembagunan industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana pembagunan industri (dok)	4	1	1	1	100%			
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat(dok)	4	1	1	1	100%			
3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri(dok)	4	1	-	-	-			

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 2024
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN FLORES TIMUR

Kode					URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA 2023-2026)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL, PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d TAHUN 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					TARGET RENJA	REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(6/7)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	K		K	Rp	K	K	K
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN									
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100	100	100	100%	100	100	100
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100	100	100	100%	100	100	100
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	100	100	100	100%	100	100	100
						Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100	100	100	100	100%	100	100	100
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100		100	100	100%	100		
3	30	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah(dok)	8	0	2	2	100%	2	3	40%
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	5		2	2	100%	1	9	38%
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	24	8	6	6	100%	3	8	50%
3	30	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah(laporan)	16		4	4	100%	4		

3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan (%)	100		100	100	100%	100		
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ()	23/14	23/14	23/14	23/14	100%	23/14	12	33%
3	30	01	2.02	03	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36		-	-	-	12	24	25%
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD (dok)	12	12	12	12	100%	12	4	50%
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD(laporan)	8		2	2	100%	2		
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi dan Pelaporan BMD (%)	100		100	100	100%	100		
3	30	01	2.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencanaa kebutuhan barang milik daerah SKPD (dok)	3		-	-	-	1	8	40%
3	30	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD(laporan)	20		2	2	100%	6	6	33%
3	30	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	18		-	-	-	6		
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12		4	1	25%	1		
3	30	01	2.05	03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendatan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	36		-	-	-	12	2	25%
3	30	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai(dokumen)	4		1	1	100%	1	4	25%
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)	8		3	3	100%	1	0	
3	30	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang - undangan(orang)	1		-	-	-	0		
3	30	01	2.06		Administrasi Umum perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100		100	100	100%	100		

3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi /Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan()	12	10	3	3	100%	3	5	30%
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan ()	8		2	2	100%	3	2	50%
3	30	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan()	4		1	1	100%	1	2	40%
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan()	4	1	1	1	100%	1	2	25%
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan()	4		1	1	100%	1	2	35%
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	4	2	1	1	100%	1	24	50%
3	30	01	2.06	08	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu(laporan)	48	12	12	12	100%	12	24	25%
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD(laporan)	48	12	12	12	100%	12	1	20%
3	30	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis pada SKPD	2		-	-	-	1	1	30%
3	30	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3		-	-	-	1		
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ()	84		56	56	100%	12		
3	30	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan()	1		-	-	-		20	25%
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan ()	19		-	-	-	20	3	20%
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ()	9		-	-	-	3	5	22%
3	30	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Disediakan ()	23		2	2	100%	3	54	25%
3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan()	50		54	54	100%			
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100		100	100	100%	100		

3	30	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat – menyurat (laporan)	48	12	12	12	100%	12	24	50%
3	30	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	48	12	12	12	100%	12	24	50%
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan(laporan)	48	12	12	12	100%	12		
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	100		100	100	100%	100		
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara yang dibayar pajak dan perizinannya()	7	7	7	7	100%	7	2	25%
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3		-	-	-	2	0	
3	30	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara ()	1		-	-	-	-	2	25%
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangun lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi ()	1	1	1	1	100%	1	30	40%
3	30	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ()	34	12	28	28	100%	2		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	03			Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Cakupan sarana distribusi perdagangan	36,11					30,56		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah penglolaan sarana distribusi perdagangan()	4	1			-	1		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan ()	4	1	-	-	-	1		
3	30	03	2.02		Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Terbinanya pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)	4		5	2	40%	4		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan(Dokumen)	4	1	1	1	100%	1		
3	30	04			Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan harga barang penting	Terkendalinya harga barang (laporan)	19		19	19	100%	19		

3	30	04	2.02		Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota	Terkendalianya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota(laporan)	12		3	3	100%	3		
3	30	04	2.02	01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota(laporan)	4	1	1	1	100%	12	2	25%
3	30	04	2.02	02	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan(laporan)	4	1	1	1	100%	12	2	20%
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Jumlah laporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota(Laporan)	4	1	1	1	100%	1	16,37	
3	30	06			Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentasi perlindungan dan pengamanan konsumen(%)	38,67		16,37	15,59	95%	39		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang dan pengawasan	Jumlah peralatan UTTP dan Pelaku usaha yang diawasi()	945		400	381	95%	945		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang	jumlah Alat Ukur, Alat Takar , Alat Timbang, dn Alat perlengkapan Ditera ulang()	415	95	300	301	100%	415	180	34%
3	30	06	2.02	02	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina(orang)	530		100	80	80%	100	50	25%
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Hasil Penyidikan Metrologi Legal()	200		-	-	-	50		
3	30	07			Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Cakupan UMKM yang difasilitasi (%)	13,64		18,18	0	0%	23		
3	30	07	2.01		Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri	32		3	0	0	8		
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten / Kota(UMKM)	12	12	-	-	-	3	5	25%

3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan Retail, Marketplace, perhotelan dan Jasa Akomodasi(UMKM)	20	12	-	-	-	5	1	25%
3	30	07	2.01	03	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan (Dokumen)	4	1	1	1	100%			
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	02			Program Perencanaan dan pembangunan industri	Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian(%)	60,61		15,15	13,65	90%	30		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota(Dokumen)	12		1	1	100%	3		
3	31	02	2.01	01	Penyusunan rencana pembagunan industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana pembagunan industri (dok)	4	1	1	1	100%	1	2	50%
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat(dok)	4	1	1	1	100%	1	1	25%
3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri(dok)	4	1	-	-	-	-	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel 2.2 berikut ini :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN FLORES TIMUR

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)			1,25	1,75	2,15	2,94	0,94		2,15	2,94	
2	Pertumbuhan PDRB (%)			4,59	4,61	4,65	4,71	3,15		4,65	4,71	
3	Laju Inflasi Daerah (%)			0,45	0,45	0,55	0,55	4,14		3,13	0,55	

Dari tabel 2.2.di atas, Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan sebesar 11,16% dari target 1,25 atau meningkat 7,19 % dari 3,97% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan meningkatnya produktivitas industri pengolahan. Kondisi ini terutama dipicu oleh semakin meningkatnya aktivitas masyarakat sejalan dengan pulihnya kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Faktor yang cukup berperan dalam peningkatan pertumbuhan tersebut adalah meningkatnya daya beli masyarakat dan lancarnya distribusi. Akan tetapi produktivitasnya akan cenderung konstan karena produksi bahan baku pendukung tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka diprediksi produksi sektor ini akan konstan yang berakibat pada laju pertumbuhannya akan kembali kurang dari 2 digit pada tahun 2025 dan 2026. Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2023 sebesar 3,25 % dari target 4,59 atau meningkat 1,54 % dari 1,71% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Kondisi ini terutama dipicu oleh semakin meningkatnya aktivitas masyarakat sejalan dengan pulihnya kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Faktor yang cukup berperan dalam peningkatan pertumbuhan tersebut adalah semakin lancarnya distribusi barang dan jasa. Berdasarkan kondisi tersebut maka diprediksi laju pertumbuhan PDRB akan meningkat menjadi 4,65% pada tahun 2025 dan 4,71% pada tahun 2026.

Sejalan dengan pulihnya aktivitas ekonomi, daya beli masyarakat semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB Pengeluaran dari 0,95% pada tahun 2022 menjadi 2,59% pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan meningkatnya permintaan barang dan jasa yang berdampak pada meningkatnya laju inflasi pada tahun 2023 menjadi 4,14% dari target sebesar 0,45. Kondisi tersebut diperkirakan akan berlanjut sampai dengan 2 tahun ke depan sehingga diprediksi laju inflasi pada tahun 2025 sebesar 3,13 dan tahun 2026 sebesar 3,20.

2.3 Isu-Isu Strategis di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur

Isu strategis adalah hal atau kondisi yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena akan memberikan dampak yang signifikan bagi entitas dimasa yang akan datang salah satu tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur yaitu menangani urusan Perdagangan dan urusan Perindustrian. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka dapat diketahui dan diidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Flores Timur yaitu;

1. Rendahnya kualitas produksi, promosi dan pemasaran produk unggulan daerah
2. Belum optimalnya pengembangan agro industri
3. Rendahnya nilai tambah sector penyumbang PDRB

4. Belum optimalnya pengawasan harga bahan pokok
5. Belum optimalnya perlindungan dan pengamanan konsumen

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur tahun 2025 dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan. Penelaahan ini dilakukan bersama dengan Tim BP4D Kabupaten Flores Timur. Hasil review dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.362.468.600	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.941.814.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		2.658.318.600	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		2.767.664.000
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		
			Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)					Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Larantuka (OPD)	<i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)</i>	100	72.500.000	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Larantuka (OPD)	<i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)</i>	100	52.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	27.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 Dokumen	20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (laporan)	2 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (laporan)	2 Dokumen	10.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	3 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	2 Laporan	12.000.000
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	4 Laporan	15.000.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	4 Laporan	10.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	100	2.108.118.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	100	2.237.964.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	23/14 OB	2.031.018.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	23/14 OB	2.160.864.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dok)	12 Dokumen	62.100.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dok)	12 Dokumen	62.100.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD (laporan)	12 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD (laporan)	12 Laporan	15.000.000
	Administrasi barang milik Daerah pada perangkat daerah		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	100	28.000.000	Administrasi barang milik Daerah pada perangkat daerah		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	100	22.000.000
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	8.000.000	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	8.000.000
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	6 Laporan	10.000.000	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	6 Laporan	7.000.000
	Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	6 Laporan	10.000.000	Penatausahaan barang milik daerah SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	6 Laporan	7.000.000
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3	45.000.000	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3	40.000.000

	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (dokumen)	12 Dokumen	7.000.000	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (dokumen)	12 Dokumen	5.000.000
	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dok)	1 Dokumen	8.000.000	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dok)	1 Dokumen	5.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka (OPD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka (OPD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	30.000.000
	Administrasi Umum perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	145.400.000	Administrasi Umum perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	161.900.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	3 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	3 Paket	3.000.000
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	2 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	2 Paket	10.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Larantuka (OPD)	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	1 Paket	6.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Larantuka (OPD)	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	1 Paket	6.000.000
	Penyediaan Bahan logistik kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan logistik kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	1 Paket	25.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Larantuka (OPD)	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)	1 Paket	22.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Larantuka (OPD)	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)	1 Paket	12.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan (dokumen)	1 Dokumen	900.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan (dokumen)	1 Dokumen	900.000
	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu (laporan)	12 Laporan	15.000.000	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu (laporan)	12 Laporan	15.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dalam daerah, Kupang Jakarta	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	12 Laporan	53.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dalam daerah, Kupang Jakarta	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	12 Laporan	80.000.000
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumenPenatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	1 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumenPenatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	1 Dokumen	5.000.000

	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (dokumen)	1 Dokumen	5.000.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (dokumen)	1 Dokumen	5.000.000
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	100	40.000.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	100	40.000.000
	Penggadaan meubeler	Larantuka (OPD)	jumlah paket meubel yang disediakan (unit)	10 Unit	20.000.000	Penggadaan meubeler	Larantuka (OPD)	jumlah paket meubel yang disediakan (unit)	10 Unit	20.000.000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	3 Unit	20.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	3 Unit	20.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	-	-	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah unit sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	-	-
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	129.300.000	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	128.800.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 Laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 Laporan	1.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	12 Laporan	45.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	12 Laporan	45.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12 Laporan	82.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12 Laporan	82.800.000
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)		90.000.000	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)		85.000.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara yang dibawar pajak dan periiannya (unit)	7 Unit	60.000.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara yang dibawar pajak dan periiannya (unit)	7 Unit	55.000.000

	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	-	-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	-	-
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1 Unit	20.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1 Unit	15.000.000
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1 Unit	15.000.000
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Cakupan sarana distribusi perdagangan (%)			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Cakupan sarana distribusi perdagangan (%)	33,33	135.000.000
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1	100.000.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1	100.000.000
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kec. Larantuka (Pasar inpres)	Jumlah sarana distribusi perdagangan (unit)	1 Unit	100.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kec. Larantuka (Pasar inpres)	Jumlah sarana distribusi perdagangan (unit)	1 Unit	100.000.000
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Terbinanya pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)		25.000.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Terbinanya pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)		35.000.000
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kec. Adonara Barat (Pasar Waiwadan)	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan (dokumen)	1 Dokumen	25.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kec. Adonara Barat (Pasar Waiwadan)	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan (dokumen)	1 Dokumen	35.000.000
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	19	Terkendalnya harga barang (Laporan)	3 Laporan	145.000.000	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	19	Terkendalnya harga barang (Laporan)	3 Laporan	540.000.000
	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten/kota	19	Terkendalnya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota	3 Laporan	145.000.000	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten/kota	19	Terkendalnya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota	3 Laporan	540.000.000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada pelaku usaha Distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Flores Timur Daratan, Adonara, Solor	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota (laporan)	1 Laporan	20.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada pelaku usaha Distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Flores Timur Daratan, Adonara, Solor	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota (laporan)	1 Laporan	20.000.000

	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi	Flores Timur Daratan, Adonara, Solor	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan (laporan)	1 Laporan	20.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi	Flores Timur Daratan, Adonara, Solor	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan (laporan)	1 Laporan	20.000.000
	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota	19 Kec.	Jumlah loporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota(laporan)	1 Laporan	105.000.000	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota	19 Kec.	Jumlah loporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota(laporan)	1 Laporan	500.000.000
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	19 Kec.	Persentase Perlindungan dan pengamanan konsumen (%)	38,67	72.000.000	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	19 Kec.	Persentase Perlindungan dan pengamanan konsumen (%)	38,67	82.000.000
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</i>		<i>Jumlah Peralatan UTTP dan Pelaku usaha yang diawasi</i>	945 Unit	72.000.000	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</i>		<i>Jumlah Peralatan UTTP dan Pelaku usaha yang diawasi</i>	450 Unit	82.000.000
	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang	19 Kec.	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar , Alat Timbang, dn Alat perlengkapan Ditera ulang (unit)	415 Unit	50.000.000	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang	19 Kec.	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar , Alat Timbang, dn Alat perlengkapan Ditera ulang (unit)	300 Unit	62.000.000
	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	19 Kec.	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina(orang)	530 Unit	8.000.000	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	19 Kec.	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina(orang)	100 Unit	6.000.000
	Penyidikan Metrologi Legal	19 Kec.	Jumlah unit hasil penyidikan mentrologi legal (unit)	50 Unit	14.000.000	Penyidikan Metrologi Legal	19 Kec.	Jumlah unit hasil penyidikan mentrologi legal (unit)	50 Unit	14.000.000
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	27,27	84.150.000	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	27,27	84.150.000
	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>		<i>Jumlah IKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri (UMKM)</i>	8 UMKM	84.150.000	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>		<i>Jumlah IKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri (UMKM)</i>	8 UMKM	84.150.000
	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	Larantuka, Kupang, Luar daerah	Jumlah IKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten / Kota (UMKM)	3 UMKM	50.000.000	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	Larantuka, Kupang, Luar daerah	Jumlah IKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten / Kota (UMKM)	3 UMKM	50.000.000
	Pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	Larantuka, Kupang, Luar daerah	Jumlah IKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kementerian dengan Ratail, Marketplace, perhotelan dan Jasa Akomodasi (UMKM)	5 UMKM	34.150.000	Pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	Larantuka, Kupang, Luar daerah	Jumlah IKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kementerian dengan Ratail, Marketplace, perhotelan dan Jasa Akomodasi (UMKM)	5 UMKM	34.150.000

	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Larantuka, Kupang, Luar daerah	Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan	-	-	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Larantuka, Kupang, Luar daerah	Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian (%)	45,45	403.000.000	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian (%)	45,45	333.000.000
	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	403.000.000	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	333.000.000
	Penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota	19 Kec., Luar Daerah (kupang, Jakarta)	Jumlah rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota(dokumen)	1 Dokumen	140.000.000	Penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota	19 Kec., Luar Daerah (kupang, Jakarta)	Jumlah rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota(dokumen)	1 Dokumen	25.000.000
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	19 Kec., Luar Daerah (kupang, Jakarta)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat (dokumen)	1 Dokumen	203.000.000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	19 Kec., Luar Daerah (kupang, Jakarta)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat (dokumen)	1 Dokumen	293.000.000
	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	19 Kec., Luar Daerah (kupang, Jakarta)	Jumlah dokumen Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri (dokumen)	1 Dokumen	60.000.000	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	19 Kec., Luar Daerah (kupang, Jakarta)	Jumlah dokumen Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri (dokumen)	1 Dokumen	15.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan usulan masyarakat diperoleh dari proses pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan, hasil reses Anggota DPRD, kunjungan kerja Kepala Daerah dan proposal dari masyarakat. Usulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Peningatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Solor Barat	Cakupan Sarana Distribusi Perdagangan		Belum adanya pembinaan dan penyediaan sarana distribusi perdagangan pada pusat pusat PKL
2	Program perencanaan dan pembangunan industri Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat dan wilayah kerjanya	Waiwerang, Tobi-lewoduli Kec Adotim, Klukenuking, Adonara Barat	Presentase Industri Skala Kecil dan Menengah yang mengelola hasil Pertanian (%)	1 Dok	Terbatasnya Pemberdayaan dan penyediaan peralatan industri bagi IKM
3	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri		Presentase Industri Skala Kecil dan Menengah yang mengelola hasil Pertanian (%)	2 Dok	Terbatasnya Pemberdayaan dan penyediaan peralatan industri bagi IKM

BAB III.

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas dan Kebijakan pembangunan nasional termuat dalam Rencana Kerja (RKP) Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional menetapkan tema: “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”

Kebijakan Nasional tersebut harus mendapat perhatian dan perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi dan terintegrasi. RKPD tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan pembangunan periode Rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 Tema Pembangunan Kabupaten Flores Timur tahun 2025 yang sejalan dengan tema RKPD adalah “**Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui peningkatan produktivitas**” dengan kebijakan strategis yang diarahkan pada Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Sesuai tema dan prioritas Pembangunan Kabupaten Flores Timur tahun 2025 maka pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur tahun 2025 difokuskan pada meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kabupaten Flores Timur sebagai OPD teknis pelaksana urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian dalam penyusunan Renja diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (PD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran Renstra PD 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar 2021	Capaian Tahun 2023	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025
Terwujudnya daya saing ekonomi	Meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB sector Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	0,33		2,15
	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan PDRB (%)	0,55		4,65
	Laju Inflasi Daerah	Menurunnya Laju Inflasi Daerah	-2,02		0,55

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan tema RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2025 yaitu **Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui peningkatan produktivitas**. Sasaran dan target kinerja perangkat daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada prioritas pembangunan tergambar prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 sebagai berikut:

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.2 Pengembangan Ekonomi Inklusif	1.1.Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Cakupan IKM yang di fasilitasi (%)	27,27
	1.5.Meningkatnya Peran UMKM dan IKM dalam Perekonomian Daerah	Presentase Industri Skala Kecil dan Menengah yang mengelola hasil Pertanian (%)	45,45
		Cakupan IKM yang difasilitasi(%)	27,27

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang nyata sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sedangkan kegiatan merupakan tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan disusun berdasarkan tingkat urgenitas dan efektifitas pencapaian tujuan, sasaran dan program.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores timur pada tahun 2025 merencanakan sebanyak 6 program 14 kegiatan dan 42 sub kegiatan baik untuk belanja operasi maupun belanja modal. Untuk lokasi kegiatan tersebar hampir di semua wilayah Kabupaten Flores Timur, diluar kabupaten Flores Timur dan Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebutuhan Dana APBD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 3.941.814.000,-.

Jika rumusan program dan kegiatan yang dirinci tidak sesuai dengan rancangan awal rencana kerja maka akan berdampak pada capaian kinerja baik program maupun kegiatan dan diharapkan kebutuhan anggaran yang ada di rumusan rencana kerja dapat sesuai dengan yang diharapkan untuk mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini di buat untuk mencapai tujuan dan dan sasaran maka dibuat rumusan rencana program prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN										957.150.000			612.000.000
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								624.150.000			392.000.000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terkendalinya harga barang (laporan)	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	540.000.000		19 Kecamatan	165.000.000
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	540.000.000		19 Kecamatan	165.000.000
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Wulanggitan (Boru), Larantuka (Semua Kel/Desa), Tanjung Bunga (Ratulodong), Solor Barat (Ritaebang), Solor Timur (Menanga), Adonara Barat (Waiwadan), Adonara Timur (Waiwerang Kota), Solor Selatan (Kelike)	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	20.000.000

3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan								
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Flores Timur, Wulanggitang (Boru), Larantuka (Ekasapta, Lamawalang), Tanjung Bunga (Ratulodong), Adonara Barat (Waiwadan), Adonara Timur (Waiwerang Kota)	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	20.000.000
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	125.000.000
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan UMKM yang difasilitasi (%)			27,27	84.150.000		31,82	227.000.000
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				27,27	84.150.000		31,82	227.000.000
3	30	7	2.01	5	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	3 UMKM	3 UMKM	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 UMKM	100.000.000
3	30	7	2.01	6	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								

						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	5 UMKM	5 UMKM	34.150.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 UMKM	127.000.000,00
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								333.000.000			220.000.000
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian(%)			45,45	333.000.000		60,61	220.000.000
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					333.000.000		60,61	220.000.000
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	150.000.000,00
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Adonara Timur (Waiwerang, Tobilewoduli) , *** Wotan Ulumado (Klukengnuking), *** Adonara Barat (Bugalima)	1 Dokumen	1 Dokumen	293.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	70.000.000,00
3	31	2	2.01	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri								
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	-

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur 2025 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2025.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							2.900.988.846,00
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							2.680.988.846,00
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		100	2.767.664.000			x) Penunjang Prioritas	2.029.988.846,00
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							103.000.000,00
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	27.500.000,00
3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	23.000.000,00
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	12.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	27.500.000,00
3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	25.000.000,00
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.237.964.000				1.595.642.196,00
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23/12 Orang/bulan	2.160.864.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x) Penunjang Prioritas	1.548.142.196,00
3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	62.100.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	15.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	27.500.000,00
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			22.000.000				15.000.000,00
3	30	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	30	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	7.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00

3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	7.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.000.000	45.000.000,00			65.000.000,00
3	30	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
3	30	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			161.900.000				110.062.650,00
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	2.800.000,00
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							

						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	6.000.000,00
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	7.462.650,00
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	900.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	1.800.000,00
3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	21.000.000,00
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
3	30	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	0,00
3	30	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							

						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			40.000.000				33.500.000,00
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	20.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	2.500.000,00
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	31.000.000,00
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			128.800.000				39.784.000,00
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.800.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	RETRIBUSI JASA USAHA	x) Penunjang Prioritas	2.784.000,00
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.000.000				68.000.000,00

3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	55.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	53.000.000,00
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x) Penunjang Prioritas	5.000.000,00
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan sarana distribusi perdagangan	33,33	135.000.000			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	100.000.000,00
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			100.000.000				100.000.000,00
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan							
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	100.000.000	Adonara Timur (Waiwerang Kota)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	100.000.000,00
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			35.000.000				0,00
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	35.000.000	*(Solor Barat) dan **Titehena (Lewoingu)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	0,00

3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terkendalnya harga barang (laporan)	19	540.000.000			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	165.000.000,00
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			540.000.000				165.000.000,00
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.000.000	Kab. Flores Timur, Wulanggitang (Boru), Larantuka (Semua Kel/Desa), Tanjung Bunga (Ratulodong), Solor Barat (Ritaebang), Solor Timur (Menanga), Adonara Barat (Waiwadan), Adonara Timur (Waiwerang Kota), Solor Selatan (Kelike)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	20.000.000,00
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan							
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	20.000.000	Kab. Flores Timur, Wulanggitang (Boru), Larantuka (Ekasapta, Lamawalang), Tanjung Bunga (Ratulodong), Adonara Barat (Waiwadan), Adonara Timur (Waiwerang Kota)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	20.000.000,00
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							

						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	500.000.000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	125.000.000,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentasi perlindungan dan pengamanan konsumen(%)	38,67	82.000.000			x) Penunjang Prioritas	159.000.000,00
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			82.000.000				159.000.000,00
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	300 Unit	62.000.000	Kab. Flores Timur, Wulanggitang (Semua Kel/Desa), Larantuka (Semua Kel/Desa), Adonara Barat (Semua Kel/Desa), Adonara Timur (Semua Kel/Desa), Solor Selatan (Semua Kel/Desa)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal							
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	6.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal							
						Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	50 Unit	14.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	x) Penunjang Prioritas	59.000.000,00
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan UMKM yang difasilitasi (%)	27,27	84.150.000			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	227.000.000,00
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			84.150.000				227.000.000,00
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							

						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3 UMKM	50.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	100.000.000,00
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5 UMKM	34.150.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	127.000.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			333.000.000				220.000.000,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian (%)	45,45	333.000.000			1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	220.000.000,00
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			333.000.000				220.000.000,00
3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Flores Timur, Kecamatan Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	150.000.000,00
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	293.000.000	Adonara Timur (Waiwerang, Tobilewoduli) , *** Wotan Ulumado (Klukengnuking), *** Adonara Barat (Bugalima)	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	70.000.000,00
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri							
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1. Pengembangan Ekonomi Inklusif	0,00

BAB V.

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur tahun 2025 mengacu pada tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Perdagangan dan Perindustrian, disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2025. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yang mendesak untuk dilaksanakan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur akan dilaksanakan pada tahun 2025. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur.

Melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Larantuka, Juli 2024

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Flores Timur,

SIPRIANUS SINA RITAN, S.Sos, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197001231 199903 1 056